

**PERAN POLISI SEKTOR (POLSEK) SUKODONO DALAM MENCEGAH
TERJADINYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIWILAYAH
KECAMATAN SUKODONO**

Gabrella Two Marcelina

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Bhayangkara Surabaya

E-mail : bellatwomarcellina@gmail.com

ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk mengenali bagaimana kedudukan kepolisian Polisi Sektor (Polsek) Sukodono dalam menghindari terbentuknya penyalahgunaan Narkoba diwilayah Sukodono, dalam memberikan pelayanan kepada warga adanya penyalahgunaan narkoba terpaut seluruh upaya yang dicoba secara efektif serta tepat, mulai dari aktivitas penyuluhan, patrol, sampai pendekatan kepada warga. Tata cara riset yang digunakan merupakan tipe riset kualitatif. Informan dalam riset ini merupakan pihak-pihak yang jadi pelaksana di Kepolisian Zona Sukodono Selaku Kapolsek serta pula warga Sukodono yang berfungsi aktif menolong Kepolisian Sukodono.

Metode pengumpulan informasi yang digunakan merupakan dengan wawancara secara langsung serta dokumentasi. Metode yang digunakan dalam analisis informasi merupakan reduksi informasi penyajian informasi serta penarikan kesimpulan. Hasil riset ini membuktikan kalau Kepolisian Zona Sukodono dalam kedudukannya menghindari penyalahgunaan narkoba sangat berfungsi dengan kedudukan warga yang pro aktif menolong serta menunjang jalurnya penangkalan penyalahgunaan narkoba diwilayah Sukodono.

Sebaliknya terdapatnya aspek pendukung serta penghambat yang periset bisa tarik, terdapatnya undang-undang yang melindungi wewenang polisi dalam melaksanakan kedudukannya serta melindungi hak warga

Kata Kunci : *Peran, Kepolisian, Pencegahan, Narkoba*

I. PENDAHULUAN

Keberadaan teknologi data yang terus menjadi pintar serta mutakhir menimbulkan konsep, sistem, serta tatanan baru dalam memudahkan

salah satu infrastruktur pendukung pemerintah wilayah buat menanggulangi perkara lingkungan yang dialami oleh pemerintah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang menjadi salah satu kasus narkoba dapat mudah masuk. Paling tidak terdapat sebagian pemicu negeri Indonesia jadi pasar narkoba antara lain: awal letak geografis, daerah Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara dengan total daerah 2 juta km Indonesia sendiri terdiri dari puluhan ribu pulau dengan 5 pulau besar, ialah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, serta Papua. Posisi geografis Indonesia sangatlah strategis, di mana diapit oleh 2 daratan antara lain Daratan Asia serta Daratan Australia dan 2 samudera antara lain Samudera Pasifik serta Samudera Hindia, sehingga Indonesia jadi pusat jalan kemudian lintas dunia.

Perihal inilah yang membuat Indonesia jadi pintu masuk untuk sindikat internasional buat memasukan narkoba ke Indonesia; kedua: jumlah penduduk, Indonesia pada tahun 2018 menggapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki serta 131,88 juta jiwa wanita. Bagi Berdasarkan kelompok usia penduduk yang masih terkategori anakanak (0-14 tahun) menggapai 70,49 juta jiwa ataupun dekat 26,6% dari total populasi.

Buat populasi yang masuk jenis umur produktif (14-64 tahun) 179,13 juta jiwa serta penduduk umur lanjut 65 tahun keatas sebanyak 85,89 juta jiwa (5,8%), Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 diproyeksi 266,91 juta jiwa. Bagi berdasarkan tipe kelamin, jumlah terdiri atas 134 juta jiwa laki laki serta 132,89 juta jiwa wanita. Lalu sosial budaya, proses pergantian sosial yang tengah berlangsung di indonesia menandai pula pertumbuhan kota dengan kompleksitas gunanya yang tidak lagi Cuma memiliki guna

administratif serta komersial, melainkan berkembang selaku simpul interaksi sosial yang pengaruhi sistem nilai serta norma dan sikap masyarakat warga Indonesia. Keberadaan obat bius serta zat-zat narkotika telah mulai diketahui dekat tahun 1927, dengan terdapatnya kebijakan yang terbuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang menghasilkan V.M.O staatsblad 1927 No.278 serta No.536 ialah peraturan tentang obat bius serta candu. Pada dini tahun 1970-an penyalahgunaan narkotika terus menjadi tidak terkendalikan sehingga pada bertepatan pada 8 september 1971, Presiden menghasilkan Instruksi No.6 Tahun 1971 yang salah satu intinya merupakan memberantas penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dikira lumayan menekan sehingga mendesak lahirnya Undang-Undang No 9 Tahun 1976, yang setelah itu disempurnakan dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang setelah itu direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Masfufa, 2017).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ikhtiar lainnya, seharusnya pihak kepolisian dapat menekan masalah kejahatan narkoba di Kecamatan Sukodono agar tidak meningkat dari tahun ke tahun, namun pada kenyataannya dalam 3 tahun terakhir di Narkoba yang dilakukan Sukodono tidak pernah masuk jajaran kepolisian, salah satunya tertangkap karena menggunakan narkoba. Hingga perlu mencoba mempelajari kasustersebut

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran polsek sukodono dalam mencegah penyalahgunaan narkoba diwilayah Sukodono?
2. Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat penyalahgunaan narkoba?
3. Bagaimana upaya Polsek sukodono dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba diwilayah sukodono?

III. LANDASAN TEORI

1. Teori Peran Organisasi Stephen P. Robbins

organisasi memiliki batas yang relatif bisa diidentifikasi. Batas bisa berganti dalam kurun waktu tertentu serta tidak senantiasa jelas, tetapi suatu batas yang nyata wajib terdapat supaya kita bisa membedakan antara anggota serta bukan anggota. Batas cenderung dicapai lewat perjanjian yang eksplisit ataupun implisit antara para anggota serta organisasinya. Pada mayoritas ikatan kepegawaian, ada suatu perjanjian yang implisit di mana pekerjaan itu diganti dengan pembayaran upah. P. Robbins melaporkan kalau Organisasi merupakan kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batas yang relatif bisa diidentifikasi, yang bekerja atas bawah yang relatif terus menerus buat menggapai sesuatu tujuan bersama ataupun sekelompok tujuan.

Bagi Berdasarkan (Stephen P. Robbins Edisi 3 1994:54)

:Orang-orang yang terdapat di dalam sesuatu organisasi memiliki sesuatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Hendak namun kebalikannya organisasi mengalami pergantian yang konstan di dalam keanggotaan mereka, walaupun pada dikala mereka jadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif tertib.

Definisi Pelayanan publik bagi berdasarkan Harbani Pasolong (2007:128) ialah masing-masing kegiatan yang dicoba oleh pemerintah terhadap sebagian manusia yang memiliki masing-masing kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan maupun kesatuan, dan menawarkan kepuasan meski meskipun hasilnya

tidak terikat pada suatu produk secara raga.

Penerapan pelayanan publik ialah kewajiban untuk tiap lembaga pemerintahan. Bersumber pada Bab I Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 25/2009 penyelenggara pelayanan publik merupakan tiap institusi penyelenggara negeri koperasi, lembaga independen lembaga independen yang dibangun bersumber pada undang- undang buat aktivitas pelayanan publik, serta tubuh hukum lain yang dibangun semata-mata buat aktivitas pelayanan publik. Dari penafsiran serta uraian tersebut, ada 3 faktor berarti dalam pelayanan publik, ialah faktor awal merupakan organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan ialah Pemerintah/Pemerintah Wilayah faktor kedua, merupakan penerima layanan (pelanggan) ialah orang ataupun warga ataupun organisasi yang berkepentingan, serta faktor ketiga, merupakan kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh layanan (pelanggan).

Penerapan pelayanan publik merupakan sesuatu proses dimana pemerintah ataupun lembaga publik membagikan pelayanan ataupun jasa kepada warga secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan penuhi kebutuhan warga serta tingkatan kesejahteraan universal Penerapan pelayanan publik bisa dicoba oleh bermacam lembaga publik semacam

pemerintah, tubuh usaha kepunyaan negeri serta lembaga swadaya warga.

2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di wilayah kecamatan Sukodono adalah sebagai berikut:

1. Gaya Hidup konsumtif dari pelaku, sehingga membuat tingginya kebutuhan hidup membuatnya menghalalkan segala cara untuk mencari uang.
2. Sumber Daya Manusia Kurangnya pemahaman dari Penyalahgunaan Narkotika tentang banayak nya akibat dari penyalahgunaan narkotika Jenis Ganja
3. Faktor Ekonomi Tingginya angka pengangguran menyebabkan pelaku mengambil jalan pintas dalam mencari uang untuk mempertahankan kehidupannya sehari-hari.

Dengan demikian harusnya pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat menyediakan lapangan kerja lebih banyak lagi untuk menekan Angka pengangguran dan juga Kepolisian dan BNN Kabupaten Sidoarjo harus lebih sering lagi memberikan sosialisasi terhadap masyarakat di wilayah Sukodono maupun Sidoarjo sekitar terkait dengan bahayanya narkoba. Angka pengangguran dan juga Kepolisian dan BNN Kabupaten Sidoarjo terkait bahayanya Narkoba.

3. Golongan Narkotika

Narkotika golongan I merupakan zat yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya. Ganja termasuk kedalam narkotika golongan I. Penyalahgunaan ganja dilakukan dengan cara membuat ganjamenjadi seperti tembakau dan dihisap layaknya menghisap rokok. Dalam bahasa pemakaiannya di Indonesia ganja biasa disebut dengan cimeng atau gelek. Di Indonesia ganja

IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan

melalui observasi langsung, wawancara dengan kepala Polsek Sukodono, dan juga dokumentasi.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan pemerintah elektronik merupakan upaya buat meningkatkan tata kelola elektronik. Pelaksanaan kebijakan pemerintah elektronik dibesarkan buat membentuk sistem manajemen terpadu serta jaringan proses kerja. Pemakaian pemerintah elektronik buat birokrasi diharapkan jadi alternatif buat reformasi birokrasi mengarah layanan yang lebih baik. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di Indonesia, pemerintah elektronik memainkan lebih banyak kedudukan dalam tingkatkan mutu layanan publik serta menolong proses membagikan data secara lebih efisien kepada publik

Pemakaian pemerintahan elektronik di Kabupaten Sidoarjo sudah dimohon oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lewat Peraturan Bupati. Kabupaten Sidoarjo. Bagi Berdasarkan Peraturan Bupati, tujuan Pemerintah Data serta Teknologi Komunikasi merupakan upaya buat tingkatkan efisiensi, daya guna transparansi serta tanggung jawab

administrasi pemerintah. Buat menjawab tantangan-tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyajikan inovasi layanan publik berbasis Android serta web website ialah pelaksanaan sistem layanan terkenal ataupun diketahui selaku sistem layanan terkenal.

Aplikasi sistem pengendalian pembangunan wilayah ini ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo pada tahun 2021. Selaku suatu sistem pengendalian pembangunan wilayah aplikasi E-Kenda bisa ditatap selaku sesuatu pemantauan aktivitas pembangunan diawali dari formulasi rencana, penerapan serta pengendalian aktivitas (program serta kebijakan) buat menggapai kehidupan warga yang lebih maju, lebih adil, lebih makmur, serta lebih kokoh jalinan kebangsaannya sekalian sesuatu piranti lunak buat membetulkan kinerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Berikut ini fasilitas-fasilitas yang disediakan pada sistem informasi seperti terlihat pada gambar tampilan di bawah ini:

- a. Halaman website. Halaman utama website adalah halaman depan setelah login, ketika mengakses aplikasi E-KENDA melalui website <http://ekenda.sidoarjokab.go.id/>.
- b. Halaman Login. Halaman utama saat kita login melalui Aplikasi E-KENDA:

- c. Halaman Beranda admin. Tampilan Beranda Admin :

Aplikasi E-KENDA dalam pengimplementasiannya dibagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai Pengawas dan juga Core Team (operator), apabila kita login sebagai pengawas kegiatan maka terdapat lima fitur menu didalamnya diantaranya ialah Dashboard, Pelaksanaan Target, Pelaksanaan Realisasi, Evaluasi dan Pelaporan, Peta. Namun apabila login sebagai Operator Penyelenggara maka terdapat tujuh fitur menu yaitu Dashboard, Pengaturan Paket, Pelaksanaan Target, Pelaksanaan Realisasi, Evaluasi dan Pelaporan, Peta, dan Master.

Dalam penerapan implementasi kebijakan, faktor-faktor yang mendesak ketidakjelasan data umumnya disebabkan kompleksitas kebijakan, minimnya konsensus menimpa tujuan kebijakan publik, terdapatnya kepentingan politik, serta kecenderungan buat menjauhi akuntabilitas para pelakon kebijakan. Pemerintah selaku pelayan publik diwajibkan bisa membuka diri serta memastikan jalan yang efisien cocok dengan kebutuhan era supaya bisa mengkomunikasikan kebijakan dengan lebih baik sehingga bisa membagikan uraian yang komprehensif serta menggali masukan atas kebijakan dengan metode yang simpel serta gampang dimengerti oleh segala pihak.

a. Komunikasi

komunikasi dimaksud selaku proses penyampaian data komunikator kepada komunikan. Komunikasi mempunyai kedudukan ataupun guna berarti dalam memastikan keberhasilan sesuatu implementasi kebijakan publik. Pelakon kebijakan butuh memperoleh data menimpa kebijakan supaya bisa menguasai isi, tujuan, arah, kelompok sasaran dari sesuatu kebijakan dan mengenali apa yang wajib dipersiapkan serta dicoba buat melakukan kebijakan tersebut guna menggapai tujuan serta sasaran kebijakan cocok dengan apa yang diharapkan.

Dalam penerapan implementasi kebijakan, faktor-faktor yang

mendesak ketidakjelasan data umumnya disebabkan kompleksitas kebijakan, minimnya konsensus menimpa tujuan kebijakan publik, terdapatnya kepentingan politik, serta kecenderungan buat menjauhi akuntabilitas para pelakon kebijakan.

Pemerintah selaku pelayan publik diwajibkan bisa membuka diri serta memastikan jalan yang efisien cocok dengan kebutuhan era supaya bisa mengkomunikasikan kebijakan dengan lebih baik sehingga bisa membagikan uraian yang komprehensif serta menggali masukan atas kebijakan dengan metode yang simpel serta gampang dimengerti oleh segala pihak.

Perihal ini bertujuan buat menjalankan komunikasi 2 arah antara pemerintah selaku pembentuk kebijakan serta warga selaku penerima kebijakan, dan buat menjauhi keraguan serta kesalahpahaman terpaut kebijakan yang berpotensi bisa memunculkan konflik. Dalam kaitannya dengan poin komunikasi, komunikasi yang digunakan dalam penerapannya ialah dalam bentuk sosialisasi.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang menjadi fokus pada penelitian ini ada dua aspek, yaitu sumber daya manusia yaitu Aparatur atau admin yang menjalankan aplikasi E-Kenda dan yang kedua adalah dinas terkait pembangunan yang

menggunakan aplikasi E-kenda. Dalam pelaksanaan nya aplikasi E-Kenda ini tentu saja dijalankan oleh dinas khusus bagian pembangunan, sehingga setiap kegiatannya menjadi efisien karena fokus pada bidang yang mereka jalani. Jumlah operator dalam aplikasi E-Kenda berjumlah 6 orang sehingga cukup untuk menjalankan setiap kegiatannya.

Pekerjaan kantor yang padat memerlukan dorongan fasilitas yang mencukupi Fasilitas kantor selaku bagian integral dari totalitas aktivitas ataupun kegiatan kerja yang memiliki guna serta kedudukan dalam menggapai tujuan. Fasilitas kantor sangat berfungsi berarti dalam proses penerapan aktivitas kantor. Fasilitas kantor selaku perlengkapan ataupun barang bergerak secara langsung digunakan dalam proses penyelesaian tugas serta pekerjaan kantor.

Bersumber pada perihal tersebut bisa diambil kesimpulan kalau fasilitas kantor ialah sesuatu sarana aksesoris berbentuk benda ataupun barang bergerak secara langsung bisa digunakan buat mempermudah penerapan proses aktivitas kantor dalam menggapai tujuan yang sudah diresmikan Contoh fasilitas kantor semacam meja, sofa tempat penyimpanan dokumen, mesin-mesin kantor, perlengkapan ataupun peralatan kantor serta lain sebagainya.

Kebutuhan fasilitas serta prasarana kantor sangat banyak. Pengelolaan fasilitas serta prasarana kantor memiliki peranan yang sangat berarti untuk terlaksananya kegiatan kerja pegawai. Pengelolaan fasilitas serta prasarana kantor yang baik, efektif serta efisien absolut dibutuhkan buat menggapai tujuan organisasi. Sesuatu kantor dalam melaksanakan pekerjaan kantor memerlukan sokongan fasilitas serta prasarana kantor yang mencukupi supaya tujuan penerapan pekerjaan kantor bisa tercapai dengan maksimal Kantor yang baik pastinya mempunyai fasilitas serta prasarana yang mendukung penerapan kerja yang maksimal.

c. Disposisi

Penafsiran disposisi apabila memandang dari tulisan George Edward III merupakan keinginan kemauan serta kecenderungan para aktor kebijakan buat mempraktikkan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan bisa dicoba Perilaku serta komitmen faktor dengan program yang wajib diimplementasikan sangat dibutuhkan sebab tiap kebijakan mewajibkan faktor yang mempunyai keinginan ataupun kemauan yang solid serta komitmen besar buat mencapai tujuan dari kebijakan semacam yang telah diharapkan.

Bilamana mau implementasi sesuatu kebijakan sukses secara efisien serta pula efektif hingga para pelaksana faktor tidak cuma ketahui apa yang wajib dicoba serta mempunyai keahlian buat melakukan kebijakan tersebut, namun mereka pula wajib mempunyai keinginan buat mengimplementasikan politik. Ada 3 faktor utama yang pengaruhi keahlian serta keinginan aparat pelaksana buat melakukan sesuatu kebijakan, antara lain pengetahuan (kognisi) ialah seberapa jauh uraian pelaksana terhadap sesuatu kebijakan, arah reaksi ataupun asumsi dari para pelaksana terhadap penerapan implementasi kebijakan yang berbentuk penerimaan, ketidakpastian maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan dan keseriusan respons pelaksana terhadap sesuatu kebijakan.

Dibuatnya aplikasi ini tentu saja diharapkan dapat memudahkan dinas-dinas terkait pembangunan dalam melakukan kegiatan pembangunan mulai dari pengendalian-pemantauan-evaluasi kegiatan paket pekerjaan mulai dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan menggunakan metode DSS (*Decision Support System*) dengan cepat dan mudah. Metode ini digunakan untuk mempermudah pimpinan dalam mengambil keputusan dengan perkembangan hasil monitoring evaluasi dan pemetaan resiko pada aplikasi E-Kendali sebagai bahan pertimbangannya.

d. Struktur Birokrasi

Dalam poin struktur Birokrasi menggambarkan bagaimana urutan – urutan dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pembangunan berbasis E-KENDA ini mulai dari tingkat yang tertinggi atau inisiator sampai dengan ke tingkat pelaksana atau implementatornya.

Dari penjalasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi E-KENDA ini awal mulanya adalah di inisiasi oleh Pemerintah Kabupaten sidoarjo pada Sekretariat Daerah Bidang Pengendalian Pembangunan. Kemudian yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan pengarahan kepada setiap implementator yang ada seperti bagian Pengendalian Pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Sementara Implementator dari Aplikasi E-KENDA ini sendiri ialah Pengawas, PPKom, Pimpinan proyek, kemudian pengendali.

implementor aplikasi ini memiliki peranan sendiri setiap kegiatan, peran-peran tersebut meliputi :

1. Pengawas

Pengawas memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan pengendalian pembangunan dalam aplikasi ini, karena tugas dari pengawas ialah untuk menginput Surat Tugas, Input Target, Input Realisasi, dan juga

menguploah bukti fisik (foto) berdasarkan lokasi yang sebenar-benarnya.

2. PPKom

PPKom atau singkatan dari Pejabat Pemegang Komitmen memiliki peran untuk menginput mitigasi resiko pada setiap paket pekerjaan, relasi paket SiRUP ke Belanja SIPD, approve surat tugas, dan memonitoring inputan konsultan pengawas terkait kemajuan progres fisik dan bukti fisik.

3. Pimpinan Proyek

Dalam implementor kegiatan pengendalian pembangunan, Pimpinan proyek memiliki peran untuk melihat laporan kegiatan, memberi keputusan, dan melihat notifikasi dari paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

4. Pengendali

Dan yang terakhir adalah pengendali. Pengendali disini yang dimaksudkan ialah Sekretariat Daerah Kab Sidoarjo di bidang Pengendalian Pembangunan. Pengendali sendiri memiliki peran sebagai pemilah antara paket fisik dan non fisik, pemilah antara paket prioritas dan non prioritas, sebagai monitoring Perencanaan dan Realisasi Paket Pekerjaan, kemudian melakukan Evaluasi dan Pelaporan kepada pimpinan

Faktor penghambat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis E-KENDA

Sebelum menentukan poin – poin yang menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan pengendalian pembangunan daerah melalui AplikasiE-kendali Daerah penulis terlebih dahulu memberikan pertanyaan kepada pihak terkait. Dari Situlah peneliti bisa menyimpulkan bahwasannya sumber daya menjadi Aspek utama dalam faktor penghambat pelaksanaan program pengendali pembangunan daerah ini.

a. Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi merupakan usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, supaya aktivitas dari pada bagian-bagian itu berakhir pada waktunya, sehingga masing- masing bisa membagikan sumbangan usahanya secara optimal supaya mendapatkan hasil secara totalitas Koordinasi terhadap beberapa bagian- bagian yang besar pada tiap usaha yang luas dari pada organisasi demikian berartinya sehingga sebagian golongan menempatkannya di dalam pusat analisis.

Koordinasi yang efisien merupakan sesuatu keharusan buat menggapai administrasi/manajemen yang baik serta ialah tanggung jawab yang langsung dari pimpinan. Koordinasi serta kepemimpinan tidak dapat dipisahkan satu sama lain oleh sebab itu

satu sama lain bersama pengaruhi Kepemimpinan yang efisien hendak menjamin koordinasi yang baik karena pemimpin berfungsi selaku koordinator.

b. Sarana Dan Prasarana

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi permasalahan sarana dan prasarana yang masih ada kaitannya dengan sumber daya. Sarpras yang ada sebenarnya sudah sesuai standart hanya saja masih kurang maksimal sehingga diperlukan peran aktif dari pemerintah kabupaten Sidoarjo selaku pelaksana dari Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo ini.

Sarana dan Prasarana pada sistem pengendalian pembangunan daerah melalui Aplikasi E-Kendali Daerah menurut peneliti berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian sudah ada dan bisa dijalankan. Hanya saja masih ada yang kurang seperti koneksi internet yang kurang maksimal sehingga menjadi permasalahan dalam pengiriman data-data setiap kegiatan pembangunannya.

Dampak yang Ditimbulkan Dari Aplikasi E-KENDA Terhadap Pembangunan Daerah

a. Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi dan Efektivitas kerja jadi perihal kunci yang dimiliki perusahaan-perusahaan terbaik di

dunia. Industri yang efektif sanggup kurangi pemakaian waktu serta tenaga buat hal-hal yang tidak dibutuhkan sehingga mempunyai produktivitas besar.

Selaku pekerja handal Kamu pula memerlukan efisiensi kerja yang baik buat mendukung karir serta kehidupan personal Kamu Baik bekerja dari rumah, kantor, ataupun juga di antara keduanya, efisiensi besar dapat membuat pekerjaan yang dicoba lebih kilat pas serta menolong mewujudkan work-life balance. Gimana triknya Saat sebelum mangulas panduan serta caranya ayo berkenalan dahulu dengan apa yang diartikan efisiensi kerja itu sendiri. Buat tingkatkan efisiensi serta daya guna pekerja ada adap dengan memastikan tujuan di dini bisa menolong seorang mencapai kesuksesan. Karena tanpa tujuan yang jelas, Kamu hendak kehabisan arah serta motivasi buat melaksanakan pekerjaan. Tujuan yang realistis pula dibutuhkan buat menolong tingkatkan efisiensi kerja.

Tidak hanya itu, tetapi juga perlunya mencermati time management. Time management yang efisien bisa membuat pekerjaan menjadi lebih terorganisir serta efektif. Triknya ialah dengan membagi aktivitas sehari-hari ke dalam potongan-

potongan ataupun chunking, serta mengeksekusinya di waktu yang pas serta cocok dengan tingkat tenaga yang Kamu miliki. Contohnya, membagi kegiatan sehari-hari, letakkan kewajiban-kewajiban semacam membalas email, follow up dokumen, ataupun rapat di pagi hari dikala Kamu masih segar Kamu bisa melaksanakan aktivitas yang tidak sangat membutuhkan benak di sore hari dikala tenaga mulai menurun Dengan time management yang disesuaikan, Kamu dapat menuntaskan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih pendek.

Sebelum adanya aplikasi E-kenda setiap kegiatan pembangunan dilakukan secara manual yang tentu saja membutuhkan banyak waktu, tenaga dan juga biaya yang diperlukan, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menciptakan inovasi ini untuk membantu para dinas terkait pembangunan.

b. Pemanfaatan Sumberdaya yang Maksimal

Dalam pelaksanaannya sumberdaya manusia juga sangat berperan dalam point ini. Operator aplikasi ini memiliki jumlah yang cukup yaitu 6 orang sehingga dalam setiap kegiatannya tidak ada mengalami kendala karena jumlahnya yang memadai.

Dengan memaksimalkan jumlah pekerja maka pemanfaatan sumberdaya anggaran akan berjalan dengan baik pula. Karena terbatasnya jumlah anggaran maka dalam pembuatan aplikasi E-KENDA pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga mempekerjakan tenaga honorer/tenaga harian lepas dalam pembuatan aplikasi E-KENDA ini.

Tingkatkan mutu layanan yang paling utama dalam perihal memesatkan proses serta memudahkan akses interaksi, Tingkatkan transparansi pemerintahan dengan perbanyak akses data public; Tingkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan sediakan lebih banyak pelayanan serta data dan sediakan kanal akses baru kepada warga Kurangi waktu, duit serta sumber energi lain, baik di sisi pemerintah ataupun pihak-pihak yang ikut serta dengan memperpendek proses pemberian layanan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah maju dalam menjalankan setiap kegiatan pemerintahannya, salah satunya ialah pembuatan aplikasi E-KENDA ini dalam menjalankan setiap kegiatan pembangunan daerah. Dengan memanfaatkan kemajuan yang ada seperti e-government maka memberikan dampak yang baik, yaitu pemanfaatan sumberdaya yang maksimal. Sumber daya menjadi salah satu aspek yang penting dalam menilai

keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Sehingga apabila segala kegiatan berjalan dengan baik dan maksimal maka dapat disebut berhasil.

Dampak dari adanya aplikasi E-KENDA ini sangatlah banyak, terutama dalam pemanfaatan sumberdaya. Dengan adanya aplikasi ini tentunya dapat dikerjakan cukup dengan beberapa orang saja karena telah mendapatkan bantuan dari aplikasi tersebut terutama dalam sarana prasarana.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil serta pembahasan terkait dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Pengendalian pembangunan daerah berbasis elektronik melalui aplikasi E-KENDA merupakan suatu sistem pelayanan publik secara online guna membantu dinas-dinas terkait pembangunan dalam melakukan segala kegiatan pembangunan secara cepat, mulai dari kegiatan pengendalian, pemantauan dan juga evaluasi pelaksanaan paket pekerjaan mulai dari awal sampai akhir.

Implementasi Aplikasi E-Kenda ini sudah berjalan dengan baik dilihat dari 4 variabel yaitu komunikasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan juga berita melalui internet; Sumberdaya yang diberikan berupa sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang memadai; Disposisi proses pengurusan dan pengambilan

keputusan pada aplikasi ini dilakukan secara cepat dan tepat; Struktur birokrasi mulai dari atas hingga bawah dilaksanakan secara terstruktur mulai dari kepala dinas, pengawas, PPKom, pimpinan sampai dengan pengendali.

Dalam kegiatan pelaksanaannya faktor penghambat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis E-KENDA yaitu (1) kurangnya koordinasi antar Lembaga yang membuat miss informasi dengan dinas terkait pembangunan sebagai pengguna aplikasi E-KENDA ini, dan juga (2) kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti wifi.

Dampak dari adanya aplikasi ini ialah (1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan yang awalnya dilakukan secara manual sehingga proses pelaksanaannya menjadi lama dan bertele-tele sehingga dengan adanya aplikasi ini maka dapat memanfaatkan sumberdaya secara maksimal, dan juga (2) pemanfaatan sumberdaya yang maksimal, sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan jumlah operatorpun tidak memerlukan terlalu banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, Sahya Dr. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia
- Abdul Wahab, Solichin. (2014). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Dwiyanto, A. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Habibullah, Achmad. (2010). Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government. Jurnal. Jember : Universitas Jember

Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media, Yogyakarta

Sinambela, LijanPoltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. BumiAksara.

Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA)

Widodo, S. E. (2015). Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jurnal

Demante, K., & Dwiyanto, B. M. (2019). Analisis Pengaruh Electronic Word Of Mouth Terhadap Brand Image Dan Perceived Quality Serta Dampaknya Pada Purchase Intention (Studi pada Lipstik Sariayu Martha Tilaar di Kota Semarang). Diponegoro Journal of Management, 8(4), 97–105.

Elysia, V., & Wihadanto, A. (2017). Sumartono, "Implementasi e-government

untuk mendorong pelayanan publik yang terintegrasi di Indonesia,," Optim. Peran Sains Dan Teknol. Untuk Mewujudkan Smart City, 353–380.

Undang-undang

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No.8 tahun 2004 Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di Kabupaten Sidoarjo

Online

Aurellia Anindyadewi. 2022. Apa Itu Implementasi? Pengertian, Tujuan, dan Contoh Penerapannya. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya>. di akses pada 26 oktober 2022

Firdilla Kurnia. 2022. Efisien: Pengertian, Contoh, dan Perbedaanya dengan Efektif. <https://dailysocial.id/post/efisien-pengertian-contoh-dan-perbedaanya-dengan-efektif>. di akses pada 24 mei 2023

Indra Setiawan. 2021. Pemkab Sidoarjo luncurkan "E-Kenda" untuk pantau serapan anggaran. <https://jatim.antaranews.com/berita/542861/pemkab-sidoarjo-luncurkan-e-kenda-untuk-pantau-serapan-anggaran>. di akses pada 26 oktober 2022

Muslimin B Putra. 2020. Mengenal Pelayanan Publik. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>. di akses pada 26 oktober 2022

Mulyono. 2009. MODEL IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN GEORGE EDWARD III.
<https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/mo>

[del-implementasi-kebijakan-george-edward-
iii/](#). di akses pada 29 oktober 2022